



BAB I

PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan keagenan merupakan hubungan yang timbul sebagai akibat adanya separasi antara pemilik dan manajer (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya separasi antara pemilik dan manajer tersebut menimbulkan masalah yang kemudian disebut masalah keagenan. Jensen dan Meckling (1976) dan Padilla (2008) menyampaikan bahwa masalah keagenan timbul karena adanya *moral hazard* dimana manajer memiliki perilaku oportunistik dan berusaha memenuhi kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan perusahaan dan pemilik. Serta *adverse selection* yang merupakan situasi dimana pemilik tidak dapat memastikan bahwa manajer mengambil keputusan yang tepat karena manajer memiliki informasi yang cukup daripada pemilik.

Atas dasar masalah keagenan tersebut, Dalton, Hitt, Certo, dan Dalton (2007) merangkum cara untuk mengurangi masalah keagenan. Pertama, adanya *board of independence* untuk melakukan pengawasan terhadap manajer. Kedua, dengan adanya *agent equity ownership* untuk mengarahkan manajer yang memiliki kepemilikan dari perusahaan untuk menjalani bisnis sesuai kepentingan pemilik. Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Fama dan Jensen (1983) dimana perusahaan harus meningkatkan manajemen insentif untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dan manajer, serta meningkatkan pengawasan melalui adanya *Board of Director*. Hal tersebut sejalan dengan Jensen dan Meckling (1976) yang menyampaikan perlu adanya mekanisme *monitoring* untuk meminimalisir masalah keagenan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



adanya pengawasan dari pihak luar. Namun disisi lain, dalam melaksanakan mekanisme monitoring tersebut ditemukan bahwa konflik kepentingan juga terjadi dalam struktur kepemilikan dan dewan komisaris. Salah satu contoh yang membuktikan hal tersebut adalah diangkatnya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Tbk pada tahun 2016. Seharusnya Kementerian ESDM merupakan regulator yang menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas sektor-sektor perusahaan yang menjadi bagian pengawasan. Menurut pengamat, akan menjadi tidak adil jika pengawas menjadi bagian yang harus diawasi (Sumber: <http://www.tribunnews.com/bisnis/2016/11/15/arcandra-jadi-wakil-komut-pertamin-a-pengamat-bakal-ada-konflik-kepentingan>).

Karakteristik perusahaan merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi masalah keagenan karena karakteristik perusahaan akan memengaruhi penyelarasan kepentingan pihak manajemen kepada pemilik dan dapat mengatasi informasi asimetris (Suripto, 1999). Dalam penelitian ini, beberapa karakteristik perusahaan antara lain ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas perusahaan, *leverage*, likuiditas perusahaan, dan status perusahaan. Sebagaimana disampaikan dalam penelitian Yulia (2013) semakin besarnya tingkat indikator karakteristik perusahaan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan akan mengungkapkan informasi secara luas. Artinya dapat mengurangi informasi asimetris dan pengawasan terhadap pihak manajemen dapat dikurangi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam teori keagenan dimana manajer bersifat oportunistik maka perlu adanya mekanisme *monitoring* dari pihak luar, yaitu didukung dengan keberadaan dewan komisaris dan struktur kepemilikan (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam menjalankan fungsi *monitoring* tersebut, akan



lebih baik dan efektif jika dewan komisaris bersifat independen dan tidak memiliki hubungan dengan pihak manajemen maupun pemilik perusahaan. Kemudian di dalam perusahaan tentunya terdapat pemilik atau pemegang saham yang terlibat dan memiliki fungsi *monitoring* bagi pihak manajemen perusahaan. Hastuti (2005) menyampaikan bahwa ada dua karakteristik kepemilikan dalam perusahaan dengan fungsinya masing-masing untuk mengawasi kinerja pihak manajemen, yaitu kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Baik kepemilikan menyebar dan kepemilikan terkonsentrasi memiliki fungsi *monitoring* masing-masing.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu, para peneliti mengamati pengaruh antara karakteristik perusahaan terhadap karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan. Melalui penelitian terdahulu menunjukkan bahwa terdapat *research gap* mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap karakteristik dewan komisaris dan struktur kepemilikan, yang artinya menunjukkan tidak adanya konsistensi. Penelitian Hardjopranoto (2006) menemukan adanya hubungan negatif antara kepemilikan manajerial dan kebijakan *leverage*, sesuai dengan teori keagenan.

Penelitian yang telah dilakukan Jensen, Solberg, dan Zorn (1992) juga menemukan ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif yang signifikan dengan kepemilikan manajerial. Berkontra dengan penelitian sebelumnya, Haryanto dan Faisal (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap struktur kepemilikan.

Beberapa penelitian terdahulu juga menemukan perbedaan hubungan antara struktur kepemilikan dan karakteristik dewan komisaris. Penelitian Mak dan Li (2001) mengindikasikan adanya hubungan antara kepemilikan perusahaan dan struktur dewan, proporsi dewan komisaris independen berhubungan negatif dengan kepemilikan manajerial dan kepemilikan pemerintah, serta struktur kepemilikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berhubungan negatif dengan masa jabatan CEO. Hal yang sama ditemukan dalam penelitian Desender (2009) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan memiliki pengaruh penting pada prioritas yang ditetapkan dewan. Kemudian mendukung penelitian-penelitian tersebut, penelitian Méndez dan García (2007) menemukan rendahnya aktivitas komite audit pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi pada pemegang saham dalam jumlah besar. Di sisi lain penelitian Haryanto dan Faisal (2010) menyatakan bahwa dewan komisaris masih berperan pasif dan tidak mampu menjalankan tugasnya untuk mengawasi manajemen. Kemudian Iryanto (2011) juga menemukan penyebab fungsi *monitoring* menjadi tidak relevan karena adanya perekrutan anggota dewan komisaris dari anggota keluarga.

Berdasarkan teori keagenan, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka perusahaan akan mengungkapkan informasi secara luas sehingga mengurangi informasi asimetris. Maka keberadaan biaya keagenan oleh dewan komisaris dapat dikurangi. Kemudian dengan semakin besar kepemilikan institusional menunjukkan adanya pengawasan perusahaan yang semakin baik. Namun pada kenyataannya, teori tersebut tidak selalu sama dengan praktik. Fakta tersebut dapat dibuktikan melalui Tabel 1.1, Tabel 1.2, Tabel 1.3. Perusahaan-perusahaan pada tabel-tabel tersebut merupakan perusahaan-perusahaan non-keuangan yang termasuk dalam perusahaan dengan *revenue* tertinggi.

Dalam teori keagenan semakin tinggi tingkat profitabilitas mengindikasikan adanya pengurangan informasi asimetris karena perusahaan mengungkapkan informasi secara luas kepada *stakeholder*. Dengan demikian biaya keagenan oleh dewan komisaris dapat dikurangi. Namun pada Tabel 1.1 menunjukkan terjadi *gap* selama periode 2010 sampai dengan 2014, contohnya PT Telekomunikasi Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(Persero) Tbk yang mengalami kenaikan EPS pada periode 2013 sampai dengan periode 2014 justru meningkatkan jumlah dewan komisaris pada perusahaan.

Tabel 1.1
Data Earning Per Share dan Ukuran Dewan Komisaris
Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI
Periode 2010-2014

No.	Nama Perusahaan	Kode	2010		2011		2012		2013		2014	
			EPS	UKD								
1	PT Astra Internasional Tbk.	ASII	3548,6	11	4393,14	11	479,73	12	479,63	10	473,8	11
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	TLKM	572,27	5	543,9	5	637,4	5	140,92	6	145,22	7
3	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF	336,3	10	350,46	9	371,41	8	285,16	8	442,5	8
4	PT United Tractors Tbk.	UNTR	1164,13	6	1581,96	6	1549,45	6	1295,85	7	1439,52	7
5	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	GIAA	28,26	5	35,58	5	47,24	6	5,94	6	-179,39	7

Sumber : IDX Watch 2010-2011, IDX Watch 2011-2012, IDX Watch 2012-2013, IDX Watch 2013-2014, IDX Watch 2014-2015, IDX Watch 2015-2016

Kemudian berdasarkan teori keagenan semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan mengarah pada tingkat struktur kepemilikan yang rendah dan sebaliknya (Jensen dan Meckling, 1976). Pada Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa perubahan pada rasio DER tidak memengaruhi persentase kepemilikan manajerial yang cenderung tetap selama periode 2010 sampai dengan 2014, contohnya pada PT Astra Internasional Tbk. dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Tabel 1.2
Data Debt to Equity Ratio dan Kepemilikan Manajerial
Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di BEI
Periode 2010-2014

No.	Nama Perusahaan	Kode	2010		2011		2012		2013		2014	
			DER (%)	MNJ (%)								
1	PT Astra Internasional Tbk.	ASII	109,85	0,04	129,83	0,04	129,86	0,04	128,44	0,04	121,02	0,04
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	TLKM	99,25	0	88,56	0	86,13	0	83,46	0	80,77	0
3	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF	90,22	0	113,3	0,06	118,73	0,02	169,53	0,02	173,97	0,02
4	PT United Tractors Tbk.	UNTR	83,88	0	71,94	0	60,74	0	65,36	0	59,23	0
5	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	GIAA	294,93	0	120,01	0	144,02	0,01	168,4	0,01	241,62	0

Sumber : IDX Watch 2010-2011, IDX Watch 2011-2012, IDX Watch 2012-2013, IDX Watch 2013-2014, IDX Watch 2014-2015, IDX Watch 2015-2016

Méndez dan García (2007) menemukan rendahnya aktivitas komite audit pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi pada pemegang saham dalam jumlah besar. Pada tabel 1.3 dapat dilihat secara umum adanya kenaikan kepemilikan asing menyebabkan penurunan jumlah anggota komite audit. Data tersebut



mendukung pernyataan Méndez dan García (2007). Namun pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2014, adanya penurunan kepemilikan asing tidak menyebabkan kenaikan jumlah anggota komite audit, begitu pula pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2012 serta PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. tahun 2012 dan tahun 2013.

Tabel 1.3
Data Komite Audit dan Kepemilikan Asing Perusahaan-Perusahaan Non-Keluarga yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014

No	Nama Perusahaan	Kode	2010		2011		2012		2013		2014	
			KAD	ASG (%)								
1	PT Astra Internasional Tbk.	ASII	4	50,09	4	50,09	2	50,11	4	50,11	4	50,11
2	PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.	TLKM	5	0	6	0	6	8,6	5	10,33	5	9,65
3	PT Indofood Sukses Makmur Tbk.	INDF	4	50,05	4	50,05	4	50,07	3	50,07	3	50,07
4	PT United Tractors Tbk.	UNTR	3	0	3	0	3	0	3	0	3	0
5	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.	GIAA	4	10,9	4	10,9	3	10,9	3	10,9	3	25,95

Sumber : IDX Watch 2010-2011, IDX Watch 2011-2012, IDX Watch 2012-2013, IDX Watch 2013-2014, IDX Watch 2014-2015, IDX Watch 2015-2016

Terjadinya *research gap* dan *phenomenon gap* seperti yang telah diuraikan diatas menunjukkan fakta yang tidak konsisten sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai pengaruh karakteristik perusahaan terhadap karakteristik dewan komisaris yang di mediasi oleh struktur kepemilikan.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai masalah, yaitu :

1. Apakah karakteristik perusahaan memengaruhi karakteristik dewan komisaris?
2. Apakah karakteristik perusahaan memengaruhi struktur kepemilikan?
3. Apakah struktur kepemilikan memengaruhi karakteristik dewan komisaris?
4. Apakah struktur kepemilikan memediasi hubungan antara karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan komisaris?

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI KKG.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak dengan izin IBI KKG.



C. BATASAN PENELITIAN

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Karena adanya keterbatasan kemampuan dan waktu penulis, maka penulis membatasi penelitian sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014.
2. Perusahaan non-keuangan yang diteliti adalah perusahaan yang memiliki data-data lengkap sesuai dengan penelitian.

D. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah peranan struktur kepemilikan dalam memediasi hubungan antara karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan komisaris pada perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014?”

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah karakteristik perusahaan memengaruhi karakteristik dewan komisaris?
2. Untuk mengetahui apakah karakteristik perusahaan memengaruhi struktur kepemilikan?
3. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan memengaruhi karakteristik dewan komisaris?
4. Untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan memediasi hubungan antara karakteristik perusahaan dan karakteristik dewan komisaris?

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



F. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi perusahaan dan *stakeholder*

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan dan berbagai pemegang kepentingan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan pengawasan pada perusahaan secara efektif.

2. Bagi Penulis

Penelitian ini adalah praktik nyata dari teori-teori yang dipelajari selama masa perkuliahan. Serta diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai mekanisme *monitoring* pada perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Pihak Pembaca

Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan informasi bagi berbagai pihak yang membutuhkan, serta dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian yang lebih mendalam di masa mendatang.

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.